

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definisi sekarang, banyak orang-orang berbicara mengenai sudut pandang dari politik, tujuan tertentu adalah tidak luput dari kekuasaan. sehingga hilangnya eksistensi sisi politik dari sebuah kebijakan itu yang ada pada praktiknya mewarnai kehidupan manusia dimanapun mereka tinggal dan berada.¹ Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional, melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempercepat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar Negara dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Yang mana istilah ini diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok serta individu. Yang mana kebijakan ini berbeda dengan peraturan dan hukum. Kebijakan politik erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan memerintah keputusan politik dalam bentuk kebijakan yang diambil dituju kan untuk mempengaruhi kinerja aparatur, mengatur lokasi sumber daya, mengarahkan kegiatan masyarakat, melakukan pelayanan public dan menjamin keamanan dan ketentraman untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang mana pada hakikatnya kebijakan ini adalah akumulasi dari berbagai

¹<http://jurnalpolitik.ui.ac.id>, Sabtu, 4 September 2021, 16.42 wib

kepentingan, sehingga pada tiap tahap dimensi kebijakan tidak terlepas dari politik.

Adanya kekuasaan pemerintah dalam menyikapi kebijakan politik yaitu, menurut Miriam Budiarto "konsep kekuasaan merujuk kepada kemampuan seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Dengan demikian konsep kekuasaan itu sangat luas, karena setiap manusia pada hakikatnya merupakan subyek dan sekaligus sebagai obyek kekuasaan. Misalnya, sekalipun seorang presiden sebagai penguasa eksekutif tertinggi (subyek kekuasaan), tetapi ia harus tunduk kepada undang-undang (obyek kekuasaan).²

Sebagaimana diketahui, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan berarti kepandaian, kemahiran dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, mengenai cita-cita, tujuan, prinsip, dan maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.³ Berbicara mengenai kebijakan, suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Adapun prinsip tersebut yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.

Berbicara mengenai politik, dilihat dari segi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Polis* yang berarti kota yang berstatus Negara kota. Dalam Negara-kota dizaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.⁴ Jika kita membicarakan politik, maka erat kaitannya dengan Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, hingga

²Budiarto, *Pengantar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015) h. 35.

³Pusat Bahasa Depdiknas, 2005: 149

⁴Hidayat Imam, *Teori-teori Politik*, (Malang: Setara Press, 2009). h. 2.

kemakmuran.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, politik memiliki banyak definisi, setidaknya memiliki tiga definisi. Definisi pertama adalah, “(pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang system pemerintahan, dasar pemerintahan)”, definisi yang kedua adalah “segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain”. Dan yang ketiga adalah “cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijaksanaan”.⁵ Karena itulah bisa dikatakan bahwa definisi politik adalah sebuah tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan segala macam kebijakan dalam tatanan Negara agar dapat terciptanya cita-cita dan tujuan Negara sesungguhnya, bukan hanya berpatokan pada kekuasaan semata. Menurut prof. Miriam Budhiarjo dalam bukunya “*Dasar-dasar Ilmu Politik*”, politik adalah kegiatan dalam suatu system politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari system itu dan melaksanakan tujuan itu”.⁶

Seperti yang di kemukakan tersebut, bahwasanya berbicara mengenai sudut pandang politik, adanya kebijakan dalam suatu pemerintahan yang mana untuk mencapai tujuan bersama dalam bersikap kepemimpinan. Bukan hanya bicara kasak-kusuk elit (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti mempengaruhi orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan tertentu).⁷ Sikap dari kepemimpinan pemerintahan berjuang hanya sebatas tidak lain adalah kekuasaan. Penggunaan kekuasaan untuk memonopoli penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Penggunaan paksaan fisik dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Politik bersinggungan

⁵Yudi Rusfiani, Ismail Nurdin. *Dinamika Politik Kontemporer*,(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2007). h, 1.

⁶Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 1988) h. 8.

⁷ KBI

dengan segala kegiatan yang di arahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Pandangan mempengaruhi orang lain agar merubah sikap dan perilakunya secara sukarela. *Force*, penggunaan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit. Ataupun membatasi kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu. *Persuasion* (persuasi) kemampuan menyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. *Manipulation* (manipulasi), penggunaan pengaruh, dimana orang dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan. *Coercion*, peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak dengan pihak pemilik kekuasaan, termasuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kehendak yang dipengaruhi, *authority* (kewenangan).

Terdapat pada bukunya "Pengantar Dalam Hukum Indonesia", bahwasanya berpendapat tentang istilah pemerintahan yang meliputi 3 pengertian⁸ yaitu:

1. Pemerintah adalah kumpulan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata yang luas, termasuk semua badan kenegaraan yang berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan umum yaitu badan-badan kenegaraan yang bertugas membuat peraturan (legislatif), badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan dan mempertahankan peraturan yang dibuat oleh badan-badan yang disebut pertama (eksekutif), badan-badan kenegaraan yang bertugas mengadili (yudikatif).
2. Pemerintah merupakan kumpulan badan-badan kenegaraan tertinggi atau suatu badan kenegaraan-kenegaraan tertinggi

⁸ Utrecht.E, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Jakarta Balai Pustaka, 1982), h.34

yang berhak memerintah diwilayah atau dinegara, seperti raja, presiden atau perdana menteri.

Adapun politik sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Pendekatan ini membahas bagaimana konflik menjadi bahan kajian penting dalam ilmu politik. Konflik dalam hal ini dilihat sebagai akibat dari proses integrasi didalam masyarakat yang tidak tuntas atau tidak terselesaikan, dalam bahasa lain bahwa konflik dapat dianggap sebagai sebuah proses integrasi didalam suatu masyarakat. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik atau disebut oleh Subandi (1992) dengan istilah fungsionalisme. Fungsionalisme memandang bahwa politik sebagai kegiatan formulasi dan implementasi kebijakan publik. Ncholas Henry dalam bukunya *Public Administration And Public Affairs* (1980) tidak lagi menjadi ketetapan yang pasti. Karena itu akan banyak singgungan politik dengan kebijakan publik.

Kehidupan politik indonesia ini dinamis dalam negara demokrasi. Peran partai politik tidak hanya saluran aspirasi berbagai kelompok masyarakat dan bukan sebagai wahana untuk mengilustrasikan tuntutan keseluruhan dalam demokrasi. Situasi saat ini dalam politik indonesia setelah terjadi masa-masa orde baru dan munculnya rezim perubahan dalam sistem politik banyak kehadiran partai baru. Selain itu setiap partai mempunyai kepentingan, tujuan, keinginan dan bekerja sama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk keinginan yang sesuai apa yang diinginkan partai. Sebagaimana keinginan partai politik yang terang-terang bertujuan untuk memperoleh jabatan publik melalui pemilihan umum⁹.

Sudut pandang mengenai pemerintahan walikota

⁹At Wibowo, *Jurnal Kehidupan Partai Politik:2014*, h.1, minggu, 29 Agustus, 2021, 11.20 wib.

Tanjungbalai, pada kenyataannya mereka yang memiliki peran dan pengaruh besar berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota masyarakat lainnya yang tidak memiliki peran dan pengaruh. Meskipun berjumlah lebih sedikit, mereka yang memiliki keunggulan dapat memerintah atau memaksa individu-individu lainnya untuk tunduk pada pemerintahannya.¹⁰

Perbedaan yang tidak mungkin terelakkan diantara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya adalah titik awal bagi munculnya kelompok-kelompok unggulan. Terminologi elit menunjuk pada seseorang atau sekelompok orang yang menonjol dan berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu, terutama dalam bidang politik. Ada anggapan yang menyatakan bahwa di setiap masyarakat pasti diperlukan kehadiran pemimpin. Mencermati pengertian elit, sebagaimana dikemukakan oleh Lipset dan Solari, sebagaimana di kutip oleh Schoorl. Menurut mereka elit adalah posisi dalam masyarakat yang berada di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, seperti dalam posisi-posisi tinggi didalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan ajaran-ajaran bebas.¹¹ sanggah-menyanggah mengenai apakah kekuasaan terbagi secara tidak merata (yang dalam realitas menghadirkan kelompok minoritas sebagai pemegang kekuasaan dan kelompok mayoritas yang dikuasai). Apakah kekuasaan bisa dibagi secara merata diantara anggota masyarakat merupakan hal yang lumrah atau wajar terjadi. Hal ini terjadi karna adanya perspektif yang berbeda dalam mengkaji masyarakat. Perspektif elitis mengasumsi masyarakat terpilih menjadi kelompok yang berkuasa dan yang disukai. Sementara perspektif liberal memandang bahwa anggota atau kelompok masyarakat terlekat pada posisi yang setara dalam kehidupannya.

¹⁰ Haryanto, *Elit, Masa Dan Kekuasaan*. (Yogyakarta: PolGop : 2017). h.1

¹¹ J .W. Schoorl, *Modernasi*, (Jakarta : Gramedia, 1980), h. 128.

Mereka yang berkuasa pemerintahan Tanjungbalai dapat memaksa anggota-anggota masyarakat lainnya (massa) untuk tunduk dan mematuhi perintah-perintahnya. Massa bersedia untuk tunduk dan menaati perintah-perintah tersebut karena pada pemerintahan terlekat kekuasaan yang jumlahnya lebih besar dari pada yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan yang ada dimasyarakat tidak terdistribusikan secara merata. Sekelompok kecil individu memiliki jumlah kekuasaan yang lebih besar dari pada sejumlah besar individu lain.¹² Adapun Laswel, mengemukakan bahwa elit yang paling unggul kedudukannya ialah kelompok yang mempunyai kekuasaan politik. Sebab dilapangan politik, keputusan-keputusannya disertai sanksi-sanksi yang paling kuat. Keputusan-keputusan politik mengikat seluruh masyarakat karena kekuasaan politik melahirkan keputusan-keputusan berwujud formal sebagai hal paling otoritatif di antara nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Disamping itu, penyebab mengapa pemerintahan ini dinyatakan sebagai elit yang paling unggul kedudukannya karena kekuasaan politik dipandang sebagai nilai yang mempunyai daya "perekat" yang dapat mengakibatkan nilai-nilai yang lain "mengikutinya". Semua itu untuk mempertahankan posisinya sebagai kelompok yang lebih unggul dengan kelompok-kelompok yang lainnya.¹³

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa pertanyaan yang di kemukakan dalam penulisan itu dipandang menarik, penting dan perlu untuk diteliti. Rumusan masalah juga merupakan suatu usaha yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan penulis apa saja yang perlu dijawab atau dicari jalan pemecahannya. Atau dengan kata lain merupakan pertanyaan masalah.¹⁴

¹²Haryanto, *Elit, Massa dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: PolGop:2017), h. 88.

¹³Haryanto, *Elit, Massa, dan Kekuasaan*, (Yogyakarta : PolGop: 20017), h. 90.

¹⁴Husani Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*(Bandung: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

Berdasarkan latar belakang, ada beberapa masalah yang dirumuskan oleh penulis. Berikut beberapa yang menjadi rumusan masalah:

1. Bagaimana peran politik pemerintahan kota Tanjungbalai pada masyarakat kec. Teluk nibung?
2. Bagaimana wewenang politik pemerintahan kota Tanjungbalai pada masyarakat Kec. Teluk nibung?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Kec. Teluk nibung terhadap kebijakan politik pemerintahan kota Tanjungbalai?

C. Batasan Istilah

Pemerintahan adalah kumpulan semua badan kenegaraan yang berkuasa pemerintah dalam arti kata yang luas, termasuk semua badan kenegaraan yang berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan umum yaitu badan-badan yang bertugas membuat peraturan (legislatif), badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan dan mempertahankan peraturan yang dibuat oleh badan-badan yang di sebut (eksekutif), badan-badan kenegaraan yang bertugas mengadili (yudikatif).¹⁵

Kebijakan, menurut kamus besar bahasa indonesia berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Dalam garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, orgsnisasi dan sebagainya) untuk memanaajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Politik, dilihat dari segi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara kita. Jika membicarakan politik, maka erat kaitannya dengan negara, kekuasaan,

¹⁵Utrecht.E, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Jakarta Balai Pustaka, 1982), h. 34

pengambilan keputusan, kebijakan umum, hingga kemakmuran.

Jadi, kebijakan politik adalah segala sesuatu hasil keputusan baik berupa dalam sistem. Kebijakan selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat terpengaruh terhadap masyarakat melalui instrumen-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak, dan anggaran-anggaran serta memiliki arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintah didalam yurisdiksi nasional, Regional, Unisipal dan local.¹⁶

Adapun kebijakan politik yang penulis paparkan adalah berkaitan dengan peran dan wewenang politik.

Peran, adalah bahwa pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks social diartikan sebagai fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur social.¹⁷

Wewenang, adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁸

Sehingga peran dan wewenang politik dalam lingkungan masyarakat adalah adanya kewenangan yang tumpah tindih antar instansi pemerintah dan aturan yang berlaku, baik aturan ditingkat pusat atau peraturan ditingkat daerah.¹⁹ Hal tersebut terutama berhubungan dengan otoritas tanggungjawab.

¹⁶Scienceshelter. Wordpress.com/*Pengetahuan Umum/Kebijakan Politik*.

¹⁷Edy Suhardono, *Teori Peran*, (Jakarta : PT Gramedia, 1994), h. 3.

¹⁸Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1998), h. 78.

¹⁹Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sianar Harapan, 1994), h. 22.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui strategi pemerintahan Kota Tanjungbalai dalam menanggulangi kebijakan-kebijakan politik dalam lingkungan masyarakat. Yakni mengatur untuk kehidupan penduduk yang berada di lingkungan masyarakat dibawah rezim kekuasaan yang sedang berlangsung.
2. Mengetahui peran dan wewenang politik dalam pemerintahan kota Tanjungbalai, tanpa berbicara mengenai kasak-kusuk elit yang menghilangkan warna dari politik tersebut.
3. Mengetahui pandangan masyarakat mengenai kebijakan pemerintahan kota tanjungbalai khususnya di kec. Teluk nibung.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan diharapkan juga bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan proses belajar mengajar bagi para pendidik bisa meningkatkan peran serta dalam proses pembelajaran untuk lebih memacu siswa untuk aktif dan berpartisipasi lebih baik.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, terutama bagi mahasiswa lainnya. Yang dapat menambah pengetahuan tentang kebijakan pemerintah, bahwasanya

berbicara politik tidak lain hanya sekedar mendapat kekuasaan. Tidak hanya dikalangan mahasiswa, akan tetapi juga terhadap kalangan masyarakat.

Bagi peneliti, sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah, latihan berpikir dan memecahkan masalah secara kritis dan logis, serta memperdalam pengetahuan tentang kebijakan pemerintahan dalam lingkungan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat menentukan berhasil tidaknya tujuan penelitian. Oleh karena itu, pada saat membahas proposal, metode dan langkah-langkah berikut akan digunakan untuk mendapatkan bahan dan informasi yang akurat.

1. Penelitian Kualitatif

Pendekatan yang dipakai dalam pembuatan proposal ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian dirangkum dalam dua langkah. Pertama, memberikan pertanyaan langsung melalui wawancara mengenai pembahasan penelitian, sehingga mendapat jawaban yang maksimal dari pertanyaan yang diberikan. Kedua, pengumpulan bukti-bukti, data-data terkait pembahasan penelitian.

Pengumpulan data terjadi di lingkungan alam, dan penelitian kualitatif lebih tertarik fenomena mengenai di lingkungan sendiri tentang kebijakan pemerintahan walikota Tanjungbalai.

Pada penelitian kualitatif pengambilan sampel sumber data dilakukan secara analisis atau bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generelasi. Menurut moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memhami fenomenatentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.²⁰ Dengan metode kualitatif, melalui teknik pengumpulan data secara triangulasi/gabungan, maka kepastian data akan lebih terjamin dengan pendidikan, karena letak persoalan dari kebijakan politik itu hanya bersifat tidak lain berebut kekuasaan. Terutama pada parpol, disaat menjelang maupun sesudah pilkada atau pemilu, mereka mengambil kesempatan pada kalangan masyarakat setempat dalam mempengaruhi orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan adanya tujuan tertentu yaitu tidak lain kekuasaan. Yang mana kondisi yang seperti masih adanya para kaum elit (pemerintahan) yang semena-mena pada kebijakan politik yang diterapkan pada kalangan masyarakat.

2. Analisi Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu yakni berasal dari buku-buku, jurnal, artikel maupun skripsi dan kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat di amati. Yang mana data yang dikutip adalah yang bersangkutan dengan judul penelitian menjadi sebuah data dalam penelitian.

3. Objek penelitian

Objek yang diteliti pada penelitian ini, yaitu pemerintahan kota Tanjungbalai khususnya di Kec. Teluk nibung. Dan warga lingkungan masyarakat Kota Tanjungbalai di Kec. Teluk nbung.

G. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan laporan proposal skripsi ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai perbandingan,

²⁰Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashari Publishing, 2020), h.120

baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Penelitian pertama refrensi dari jurnal , yang mana penelitian ini berisi mengenai kehidupan politik di partai golkar, peran dan tujuan partai golkar mengenai pelaksanaan pendidikan politik. Adapun jurnal ini menggunakan tinjauan teoritis, yaitu sebagai karya ilmiah maka penelitian ini memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pada umumnya, menyangkut peran partai golongan karya (GOLKAR) dalam pendidikan politik. Dan tinjauan praktis, hasil penelitian ini melalui peran partai, serta bermanfaat bagi masyarakat mengenai pendidikan politik yaitu menambah wawasan sistem politik di Indonesia.

Penelitian yang kedua kebijakan politik di yogyakarta dilakukan oleh Arif Rahman, Achmad Dardiri, Setya Raharja, yang mana penelitian ini mendeskripsikan politik anggaran di yogyakarta, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis di kota yogyakarta. Subjek penelitian dipilih secara purposif dari unsur eksekutif dan legislatif. Panggilan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Adapun triangulasi dipakai dengan metode dan sumber, diskusi ahli.

Penelitian yang ketiga, diambil dari jurnal At Wibowo, 2014. tentang kebijakan politik tentang agama Khonghucu. Dimana penelitian jurnal ini berisi mengenai kebijakan-kebijakan politik di Khonghucu dan diskriminasi politik agama Khonghucu yang bersangkutan mengenai HAM. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengembangkan penelitian lebih lanjut dari penelitian kedua. Peneliti berusaha meneliti perubahan Khonghucu yang semula tidak diakui

sebagai Agama namun pada masa pemerintahan Gus Dur dikembalikan posisinya sebagai salah satu Agama di Indonesia. Selanjutnya peneliti berusaha membahas aplikasi pemberlakuan Keppres RI No. 6 Tahun 2000 pasca reformasi dan peran pemerintah Indonesia terhadap etnis Tianghoa yang menganut Agama Khonghucu.

H. Sistematika Pembahasan

Umumnya, laporan hasil penelitian dirangkai menjadi lima bab yang bertujuan untuk memberikan batasan pembahasan yang di paparkan oleh penulis dengan mengikuti struktur umum penelitian ilmunan. Adapun sistematika dalam penulisan proposal ini, secara garis besar terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, metode penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II Pembahasan, Bab ini membahas tentang materi yang diteliti, pengertian kebijakan, konsep kebijakan, konsep kebijakan pada masa rasullah saw, serta bagaimana konsep kebijakan pada pemerintahan kota tanjungbalai khususnya di kec. Teluk nibung.

BAB III, pada bab ini membahas lebih mengkaji upaya peningkatan, tentang pendapatan asli lingkungan serta peran dan wewenang pada politik tentang pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan pemerintahan kota Tanjungbalai khususny Di Kec. Teluk nibung.

BAB IV, pada Bab ini membahas tentang bukti- bukti, data-data tentang bagaimana kebijakan politik dalam pemerintahan kota Tanjungbalai di kec. Teluk nibung.

BAB V, Bab ini berisikan penutup yang berisikan kesimpulan dan

juga saran-saran yang peneliti sampaikan beradsarkan hasil penelitian. Dalam pembuatan skripsi, saran sebagai pondasi dalam penyempurnaan penelitian dalam skripsi.

